

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DI
KECAMATAN RENGAT KABUPATEN INDRAGIRI HULU
(Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor :
062/Pdt.G/2009/PA Rengat)**

Oleh : Fendra Yuli Hardiyanto

Pembimbing 1 : Dr.Maryati Bachtiar SH.,M.Kn.

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat : Jl. Terubuk Perumahan Silver Silk

Email : hardyboy40@ymail.com - Telepon : 085278534353

ABSTRACT

Joint property is marital property acquired during marriage by both husband and wife, who are in the power of the husband and wife together, so that use should be made with the consent of both parties (unless provided otherwise in the marriage covenant). Joint property is set in the Compilation of Islamic Law Article 97 which states: "widow or widower who divorced each entitled to half of the joint property to the extent not otherwise stipulated in the marriage covenant". One of the underlying case verdict of joint property with Article 97 Compilation of Islamic Law is Case Number:062/Pdt.G/2009/PA.

The principal issues in this research, namely: How does the setting on the Division of joint property after Divorce according Compilation of Islamic Law? and How consideration of the judges on the basis of the division of joint property after divorce in Decision Case Number: 062 / Pdt.G/2009/PA.RGT?

This research views of the kind, the data used, and based on the core issues in this research, including normative legal research or legal research literature, the research done by using secondary data in the form of a copy of the decision on Case Number: 062 / Pdt.G / 2009 / PA .RGT as the main data research and other secondary data. This is a descriptive research that illustrates clearly and in detail about the legal reasoning of judges and application of the rules of joint property in Case Number: 062 / Pdt.G / 2009 / PA.RGT.

In this case of the partnership has been happening since the beginning of the marriage both parties. The case of all the property of the partnership between the defendant and the plaintiff's entire property. Because of this partnership is not limited in accordance with the discussion shirkah mufawadhah. Partnerships have property that can be used by a husband and wife to finance their daily lives and their children. The husband and wife as a whole with their children.

Judge basic considerations in deciding civil cases Number: 062 / PDT.G / 2009 / PA.RGT not meet the principle of legal certainty, because in this case the judges accept the testimony of plaintiff's brother. In evidence presented to the witness if the witness testified the knowledge of a property, then the witness should not have blood ties with one of the litigants, which is related by blood, by marriage or family member of one of the parties in a straight descent in accordance with Article 145 Paragraph 1e (a) HIR and Article 172 Paragraph 1 Rbg.

Keywords: community property – divorce – Rengat

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perceraian bukan saja dikarenakan hukum agama dan perundang-undangan, tetapi juga berakibat sejauh mana pengaruh budaya malu dan kontrol dari masyarakat, pada masyarakat yang kekerabatannya sangat kuat, perceraian adalah kata sulit yang dikeluarkan tetapi pada masyarakat yang memiliki kelemahan sistem kekerabatannya maka akan mudah terjadi perceraian.

Perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang harta bersama antara lain :

1. Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama, dan Pasal 35 ayat (2) menyatakan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing penerima, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan Pasal 36 ayat (2) yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.

3. Pasal 37 ayat (1) yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut.

Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan, namun kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang dimilikinya. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih jelas pembagiannya, akan tetapi pada usia perkawinan yang sudah tua harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci satu persatu.

Putusan Hakim dalam perkara Nomor : 062/PDT.G/2009/PA RENGAT ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum pada bukti saksi, karena Penggugat mengajukan kakak kandung Penggugat yang mempunyai hubungan darah dengan Penggugat untuk menjadi saksi. Majelis hakim menerima kesaksian kakak kandung Penggugat, padahal kesaksian tersebut harus ditolak atau tidak dapat didengar keterangannya sesuai dengan Pasal 145 ayat 1e (satu) HIR dan Pasal 172 ayat 1 Rbg yang menyatakan bahwa siapa bila saksi diajukan untuk memberikan keterangan terhadap pengetahuan terhadap suatu harta maka saksi tidak boleh yang ada hubungan darah dengan salah satu pihak yang berperkara yaitu hubungan keluarga sedarah, dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus.

Perkara yang menyangkut perceraian dan kemudian berlanjut dengan pembagian

¹ Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 6, 2006, hlm 1-2

harta bersama ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Provinsi Riau yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan tentunya penyelesaian kasus pembagian harta bersama ini berada dalam kewenangan Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Negeri.

Berkaitan dengan pembagian harta bersama akibat perceraian ini penulis ingin mengkaji lebih jauh yaitu dengan melakukan penelitian dengan judul : Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu (Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor : 062/Pdt.G/2009/PA Rengat).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pembagian harta bersama setelah perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian dalam Putusan Perkara Nomor : 062/PDT.G/2009/PA.RGT ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pembagian Harta Bersama setelah Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim terhadap pembagian harta bersama setelah perceraian dalam Putusan Perkara Nomor : 062/PDT.G/2009/PA.RGT

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah Pengetahuan dan Pemahaman penulis

tentang perkara gugatan harta bersama dalam perkawinan, khususnya dalam penerapan saksi denda.

- b. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan evaluasi bagi penelitian selanjutnya dengan objek pembagian harta bersama
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) di Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teori

1. Teori yang berkaitan dengan Harta Bersama

Harta Bersama atau syirkah menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.

Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikemukakan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan secara hukum berlakulah kesatuan bulat antara harta kekayaan suami isteri sekedar mengenai itu dengan perkawinan tidak diadakan dengan ketentuan lain.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta : 2006, hal. 104.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, pada perinsipnya tidak lain dari pada melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsecherheit*), dan kemanfaatan (*zwachmatiheit*). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara professional, meskipun dalam praktik yang sangat sulit untuk mewujudkannya.

Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut di atas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.³

a. Keadilan

Keadilan itu sesungguhnya berhubungan dengan hati nurani, bukan definisi dan juga bukan soal formal-formalan. Ia berhubungan erat dengan praksis kehidupan sehari-hari dari manusia. Bukan soal teori-teori ilmu hukum. Kelihatannya, menurut teori ilmu hukum putusan tersebut

bagus, argumentatif ilmiah. Tetapi sebenarnya, belum menyentuh rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sehingga tepatlah apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch : “*Summum ius summa iniuria*”, bahwa keadilan tertinggi itu adalah hati nurani. Orang yang terlalu mematuhi hukum secara apa adanya seringkali justru akan merugikan keadilan.⁴

Menegakkan keadilan bukanlah sekadar menjalankan prosedur formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, setidaknya itulah pernyataan yang kerap dicetuskan oleh Moh Mahfud MD. Menurut Moh Mahfud, menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama dari pada sekadar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum.⁵

b. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh suatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.⁶

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus

⁴ Jeremies Lemek, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 25.

⁵ artikel “Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum” dalam situs <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>, diakses tanggal 14 juni 2014, 19.00 WIB.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005, hlm 160.

³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta : 2000, hlm 291.

diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat. *Lex dura, sed tamen scripta* (Undang-Undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya).⁷

c. Kemanfaatan

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak. Hakim diharapkan dalam menerapkan Undang-Undang maupun hukum yang ada didasarkan pada tujuan atau kemanfaatannya bagi yang berperkara dan masyarakat.

Mengingat putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaan semula (*restitution in integrum*). Masyarakat sangat mengharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan itu akan membawa manfaat atau kegunaan bagi kehidupan bersama dalam masyarakat. Harapan setidaknya putusan hakim dapat memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat,

artinya kepada pihak yang bersalah diberi sanksi, sementara kepada pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi atau mendapatkan apa yang menjadi haknya.

E. Kerangka Konseptual

Ada beberapa kerangka konseptual yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti antara lain :

1. Pembagian adalah sepenggal, pecahan sesuatu yang bulat atau untuk di bagi.⁸
2. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung.⁹
3. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri.¹⁰
4. Kecamatan Rengat adalah Rengat sebuah Kecamatan dan sekaligus sebagai ibu kota Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, Indonesia.¹¹
5. Kabupaten Indragiri Hulu adalah Kabupaten Indragiri Hulu atau sering disingkat Inhu adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia.¹²
6. Putusan Nomor Perkara: 062/PDT.G/2009/PA.Rgt. adalah perkara perceraian dan pembagian harta bersama pada pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Agama Rengat.

7.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁸ M. Ali.T.Deli, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung : 2000, hlm. 54

⁹ Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta:2007, hlm 189

¹¹ Wikipedia, *Kecamatan Rengat*
[http://id.wikipedia.org/wiki/Rengat, Indragiri Hulu](http://id.wikipedia.org/wiki/Rengat,_Indragiri_Hulu),
10 Mei 2014, 19.00 WIB

¹² <http://www.inhukab.go.id/node/50>, 10 Mei 2014, 19.00 WIB

⁷ *Ibid.*, hlm 161-162

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang membahas tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.¹³ Penelitian ini merupakan kajian tentang asas hukum pembagian harta bersama setelah perceraian dalam putusan Perkara Nomor : 062/PDT.G/2009/PA.RGT

2. Sumber Data

a. **Bahan hukum primer**, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

- 1) Kasus Perkara Nomor : 062/PDT.G/2009/PA.RGT
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 3) Komplikasi Hukum Islam

b. **Bahan hukum sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, dan lainnya.

c. **Bahan hukum tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi, indeks komulatif, dan lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan atau studi documenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli untuk menggunakan data yang tepat baik dalam peraturan-

peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Penelitian hukum normatif dapat dianalisis secara kualitatif adalah dianalisis data dengan tidak menggunakan statistic atau matematika ataupun sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Menarik kesimpulan dalam penelitian ini digunakan metode berfikir deduktif ialah cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

PENGATURAN TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Harta Bersama Menurut Hukum Islam

Masalah harta bersama sesungguhnya merupakan wilayah hukum yang belum disentuh, atau dapat dikatakan sebagai wilayah kajian hukum yang belum terfikirkan (*ghair al mufakkar fih*). Sebab, isu harta bersama lebih banyak berkembang dan penting untuk dibicarakan pada masa modern ini.¹⁴ Sesungguhnya masalah harta bersama tetap ada dalam kajian hukum Islam. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan *ijtihad* dan *qiyas* terhadap produk hukum islam yang sudah ada sebagai perbandingan.¹⁵

Kajian tentang harta bersama dalam hukum islam tidak terlepas dari pembahasan konsep syirkah dalam

¹³ Tim Fakultas Hukum UR, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Unri Press, Pekanbaru, 2012, hlm 7

¹⁴ Happy susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Visi Media, Jakarta;2008, hlm.49

¹⁵ *Ibid*, hlm.50

perkawinan. Banyak para ulama yang berpendapat bahwa harta bersama itu termasuk ke dalam konsep *syirkah*. Kata *syirkah* berasal dari bahasa Arab, yang artinya bersama-sama atau berpartisipasi dalam/dengan. Kata *syirkah* juga dapat diartikan menjadi sekutu atau serikat. Jadi secara bahasa *syirkah* adalah suatu bentuk pencampuran atau kerja sama.

B. Jenis - jenis Syirkah

Ada banyak pendapat ulama tentang macam-macam *syirkah* itu. Oleh karena kitab fikih itu terdiri dari berbagai mazhab, maka dalam pembahasan ini akan dibicarakan menurut empat mazhab yang terkenal, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali.¹⁶

1. Menurut Mazhab Hanafi

Ulama Hanafiyah membagi *syirkah* kepada dua bagian yaitu : *syirkah* milik (perkongsian mengenai milik) dan *syirkah 'uqud* (perkongsian berdasarkan akad atau kontrak).¹⁷

- a) *Syirkah* milik ialah perkongsian antara dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu akad atau perjanjian. *Syirkah* milik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu :¹⁸
 - 1) Perkongsian dengan terpaksa;
 - 2) Perkongsian dengan pilihan.
- b) *Syirkah 'uqud*, menurut ulama Hanafiyah ada tiga macam, yaitu :¹⁹
 - 1) *Syirkah bil Amwaal* (perkongsian modal);
 - 2) *Syirkah bil Abdaan* (perkongsian tenaga);
 - 3) *Syirkah bil Wujuh* (perkongsian modal).

Masing-masing dari tiga macam perkongsian '*uqud* ini dibagi dua lagi yaitu *syirkah mufawaddah* dan *syirkah 'inaan*.

2. Menurut Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah membagi *syirkah* atau perkongsian kepada enam macam, yaitu :

- a. *Syirkah mufawadhah* (perkongsian tak terbatas) ialah perkongsian dua orang atau lebih untuk berniaga dengan modal dari para peserta dengan ketentuan bahwa masing-masing peserta akan mendapat keuntungan sesuai dengan banyaknya modal dan masing-masing peserta.
- b. *Syirkah 'inaan* (perkongsian terbatas) ialah perkongsian dua orang atau lebih dengan ketentuan bahwa masing-masing hanya boleh bertindak dengan seizin kongsi yang lain.
- c. *Syirkah 'Amal* (perkongsian tenaga) yaitu dalam mazhab yang lain dinamakan *syirkah abdaan* dan dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan perkongsian tenaga.
- d. *Syirkah Dzimam* (perkongsian kepercayaan) yaitu perkongsian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa modal.
- e. *Syirkah jabar* (perkongsian karena turut hadir) yaitu apabila seseorang pedagang membeli suatu barang dagangan dihadapan para pedagang lain yang juga berdagang barang itu dan tidak bicara apa-apa.
- f. *Syirkah Mudharabah* (perkongsian berdua laba) atau disebut juga *Qiraadl* yaitu suatu perkongsian yang diadakan antara orang yang mempunyai modal dan orang yang tidak mempunyai modal.

3. Menurut Mazhab Syafi'i

Ulama Syafiiyah membagi *syirkah* ini kepada empat macam yaitu :

- a. *Syirkah 'inaan* (perkongsian terbatas).
- b. *Syirkah abdaan* (perkongsian tenaga).

¹⁶ H.A. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 39.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 40.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

- c. Syirkah Mufawadhah (perkongsian tak terbatas).
- d. Syirkah Wujuuh (perkongsian kepercayaan).

4. Menurut Mazhab Hambali

Menurut Hanabilah mula-mula syirkah itu dibagi dua yaitu syirkah fil mall (perkongsian kekayaan) dan syirkah fil 'uqud (perkongsian berdasarkan perjanjian). Syirkah fil mall ialah perkongsian dua orang atau lebih dalam memiliki suatu benda dengan jalan warisan, pemberian, pembelian, dan sebagainya. Syirkah fil 'uqud ialah perkongsian antara dua orang atau lebih untuk mengadakan suatu usaha dimana masing-masing akan mendapat keuntungan.

C. Bentuk Syirkah Dalam Harta Bersama

Setelah memperhatikan definisi dari macam-macam *syirkah* yang diterangkan di atas, maka harta bersama itu termasuk golongan *syirkah abdan/mufawadhah*.²⁰ Menurut Isma'il Muhammad Syah, harta bersama termasuk dalam macam *syirkah Abdan* karena dalam kenyataan yang sering terjadi di masyarakat Indonesia bahwa sebagian besar pasangan suami isteri sama-sama bekerja dalam hal mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Di samping itu, mereka juga bekerja untuk tabungan hari tua dan sebagai peninggalan yang berharga bagi anak-anaknya kelak.

Berdasarkan penjelasan di atas, harta bersama yang di *Qiyas*-kan dengan *syirkah* karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami istri. Hanya saja, dalam konsep *syirkah* pada umumnya bentuk perkongsian lebih

bersifat bisnis atau kerja sama usaha, sedangkan *syirkah* harta bersama sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, wa rahmah meskipun meliputi hal-hal yang berkenaan dengan harta benda dalam perkawinan.²¹

Pada perkara ini perkongsian sudah terjadi sejak awal pernikahan kedua belah pihak. Perkongsian terjadi dari seluruh harta tergugat maupun seluruh harta penggugat. Karena perkongsian ini tidak terbatas sesuai dengan pembahasan *syirkah mufawadhah*. Perkongsian terdapat harta benda yang dapat digunakan oleh suami isteri untuk membiayai hidup mereka sehari-hari beserta anak-anaknya. Suami dan isteri sebagai suatu kesatuan bersama anak-anaknya.

D. Sejarah Kompilasi Hukum Islam

Secara yuridis formal keberadaan negara Indonesia adalah diawali pada suatu Proklamasi Kemerdekaan-nya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945 kemudian diakui sebagai berlakunya UUD 1945. Betapapun juga, berbicara Hukum Islam di Indonesia, tidak bisa terlepas dari eksistensi negara Indonesia itu sendiri.

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai umat Islam. Menurut Yahya Harahap, Kompilasi Hukum Islam diharapkan dapat, Pertama, Melengkapi Pilar Peradilan Agama. Kedua, Menyamakan persepsi penerapan Hukum. Ketiga, mempercepat proses taqrib bainal ummah. Keempat, Menyingkirkan paham *private Affair*.²²

Setidaknya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam itu, maka saat ini

²⁰ Ismuha, *Pencarian Bersama Suami Istri Di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta:1965, hlm 78

²¹ *Ibid.*

²² Yahya Harahap, "Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Memotifikasikan Abstarksi Hukum Islam", *Mimbar Hukum*, Jakarta :1991, hlm 27

di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, Kompilasi Hukum Islam diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dilihat dari tinjauan sejarahnya Undang-Undang Perkawinan yang sekarang berlaku di Indonesia telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, hal ini didasarkan pada Rancangan Undang-Undang perkawinan yang pada awalnya memperoleh pertentangan keras dari pihak Islam, yang kemudian hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan ajaran-ajaran Islam disesuaikan dan dirubah agar tidak bertentangan. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam sendiri yang merupakan rumusan dari berbagai kitab fikih mazhab Syafi'i.

E. Pengaturan Tentang Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam

Ada baiknya terlebih dahulu kita menelusuri istilah-istilah yang bertalian dengan masalah yang sedang kita bahas ini. Di antara istilah-istilah tersebut kita jumpai misalnya: harta bersama dan lain-lain. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam memberi gambaran jelas mengenai harta bersama. Dalam Bab XIII Pasal 85-97 KHI merumuskan pengertian yang rinci mengenai:

1. Harta bawaan: yang dimaksud ialah harta yang dibawa oleh suami atau isteri pada saat melakukan perkawinan. Dapat dikatakan bahwa harta tersebut sebagai pemilik asli dari suami isteri. Pemilik terhadap harta bawaan dijamin keberadaannya secara juridis oleh hukum perkawinan.
2. Harta pribadi yaitu diperoleh oleh suami atau isteri, selama perkawinan berlangsung, sebagai hadiah wasiat atau warisan yang diperoleh secara pribadi terlepas dari soal perkawinan.
3. Harta bersama: yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara isteri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai "hasil karya" dari suami isteri, atau suami atau isteri dalam kaitan dengan perkawinan.²³

Harta bersama terdapat pengertian yang menonjol yaitu bahwa perolehannya atas hasil karya mereka berdua dan dalam masa perkawinan. Dua syarat ini adalah pengertian secara kumulatif dalam harta bersama. Berbeda dengan harta bawaan, pada angka (1) yang diperoleh sebelum perkawinan, dan harta pada angka (2) yang diperoleh secara pribadi tanpa hasil karya.

DASAR PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 062/PDT.G/2009/PA.RGT

A. Pertimbangan Hakim Berdasarkan Kepada Azas Kepastian Hukum, Azas Keadilan Dan Azas Kemanfaatan

Putusan hakim di pengadilan idealnya mengandung aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Dalam implementasinya tidak mudah untuk

²³ Supandi, *Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, Hlm 175.

mensinergikan ketiga aspek tersebut, terutama antara aspek kepastian hukum dan keadilan biasanya saling bertentangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tidak selamanya terpaku pada satu asas saja. Kendala yang di hadapi hakim yang cenderung kepada kepastian hukum mengalami kebuntuan manakala ketentuan-ketentuan tertulis tidak dapat menjawab persoalan yang ada. Penekanan yang lebih cenderung kepada asas keadilan berarti harus mempertimbangkan hukum yang hidup di masyarakat, yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Hakim dalam alasan dan pertimbangan hukumnya harus mampu mengakomodir segala ketentuan yang hidup dalam masyarakat berupa kebiasaan dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Penekanan yang lebih cenderung pada asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi.

Pada dasarnya penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya.

Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang bercirikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan melalui peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Penekanan yang lebih cenderung asas kemanfaatan lebih bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk manusia atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hukum

harus berguna untuk manusia. Putusan hakim di peradilan perdata, dengan demikian dapat dikatakan telah mencerminkan ketiga asas yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Namun demikian, dalam setiap putusan hakim tersebut ada penekanan-penekanan tertentu antara ketiga asas tersebut. Setiap putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum bukan berarti tidak memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan, asas keadilan dan kemanfaatan tetap ada hanya saja penekanannya lebih condong pada kepastian hukum. Demikian juga putusan hakim yang mencerminkan keadilan bukan berarti telah meniadakan kepastian hukum dan kemanfaatan, asas kepastian hukum dan kemanfaatan tercermin dalam putusan hakim tersebut, tetapi penekanannya lebih kepada asas keadilan. Sebaliknya juga apabila putusan hakim yang telah mencerminkan kemanfaatan bukan berarti tidak mengakomodir kepastian hukum dan keadilan. Asas kepastian hukum dan keadilan tetap ada, hanya saja putusan hakim tersebut lebih condong pada kemanfaatan.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Majelis Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Dalam Putusan Perkara Nomor : 062/PDT.G/2009/PA.RGT

Perselisihan pembagian harta bersama setelah perceraian merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama dan perkara ini bisa diajukan setelah perceraian terjadi dan juga bisa diajukan bersamaan dengan gugatan/permohonan perceraian (akumulasi).

Setelah jelas mana harta yang benar-benar menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baru selanjutnya harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Atas putusan tersebut tergugat dan penggugat tidak melakukan banding ke peradilan yang lebih tinggi.

Walaupun hampir seluruh pertimbangan hakim menitik beratkan kepada azas kepastian hukum tetapi bukan berarti hakim tidak mempertimbangkan sesuai dengan azas keadilan dan azas kemanfaatan. Dalam putusan ini hakim juga mempertimbangkan sesuai dengan azas keadilan dan kemanfaatan. Majelis hakim memberikan hak yang sama kepada Penggugat maupun Tergugat dan keputusan ini juga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak agar perselisihan tersebut dapat diselesaikan.

Seperti dijelaskan diatas rasa keadilan itu berbeda antara masing-masing orang, adil untuk seorang atau sebagian orang belum tentu adil menurut orang lain, maka tugas hakimlah untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi setiap orang yang mengajukan perkara ke Pengadilan atau setidaknya mendekati rasa keadilan bagi semua orang, dan dalam Perkara No 062/Pdt.G/2010/Pa. Rgt ini apa yang dirasakan adil oleh Penggugat belum tentu juga dirasakan adil oleh Tergugat.

Terhadap Penggugat dianggap majelis hakim bersikap adil apabila majelis hakim mengabulkan semua gugatan Penggugat sedangkan Tergugat menganggap putusan majelis hakim tersebut adil apabila semua tuntutan Tergugat dikabulkan oleh majelis hakim. Maka tidak mudah untuk memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak. Maka menurut penulis disinilah perlu azas kepastian hukum, seluruh permasalahan harta bersama itu harus didasarkan kepada hukum dan undang-undang yang berlaku.

Penggugat menganggap Majelis Hakim bersikap adil apabila Majelis Hakim mengabulkan semua gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menganggap putusan Majelis Hakim tersebut adil apabila semua tuntutan Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, tidak mudah untuk memenuhi rasa

keadilan kedua belah pihak, maka menurut penulis disinilah perlu asas kepastian hukum, seluruh permasalahan harta bersama itu harus didasarkan kepada hukum dan undang-undang yang berlaku.

Terdapat permasalahan lain dalam putusan ini, untuk dapat menemukan kepastian hukum, maka setiap seseorang yang mendalilkan sesuatu maka dia harus dapat membuktikan hal yang didalilkannya. Untuk dapat membuktikan dalil tersebut maka para pihak diwajibkan untuk dapat membuktikan dalilnya dengan alat bukti. Alat bukti ini dapat berupa bukti tertulis, saksi, persangkaan hakim, pengakuan dan sumpah.

Dalam bukti tertulis ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, semua bukti tertulis yang diajukan didepan sidang harus diberi meterai sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 (satu) huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan apabila bukti tersebut berbentuk fotokopi maka didepan sidang bukti tertulis yang asli (surat) harus dapat diperlihatkan, dan apabila bukti tertulis (surat) tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh hakim tersebut. Didalam putusan penyelesaian pembagian harta bersama no 062/Pdt.G/2010/Pa.Rgt ada beberapa bukti tertulis yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka seharusnya Majelis Hakim tidak bisa mempertimbangkan bukti tertulis tersebut.

Dalam bukti saksi apabila saksi diajukan untuk memberikan keterangan pengetahuannya terhadap suatu harta, maka saksi tidak boleh yang ada hubungan darah dengan salah satu pihak yang berperkara yaitu hubungan keluarga sedarah, dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus sesuai dengan Pasal 145 Ayat 1e (satu) HIR dan Pasal 172 Ayat 1 Rbg. Dalam perkara ini, Penggugat mengajukan kakak kandung Penggugat yang mempunyai

hubungan darah dengan Penggugat dan Majelis Hakim menerima kesaksian kakak kandung Penggugat, padahal kesaksian tersebut harus ditolak atau tidak dapat didengar keterangannya.

Pembentuk undang-undang dalam membuat surat atau aturan sudah pasti mempunyai alasan-alasan tertentu. Adapun alasan pembentuk undang-undang menentukan orang itu tidak dapat didengar sebagai saksi adalah :

1. Mereka pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi
2. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka memberi kesaksian
3. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin bagi mereka setelah memberikan kesaksian.

Dalam hal ini, selain kebenaran materil yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim juga harus memenuhi kebenaran formil, seharusnya untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memenuhi kebenaran formil, barulah kemudian bisa didapatkan kebenaran materil itu sendiri.

Dalam penelitian ini penulis memahami bahwa dalam memutus sebuah perkara yang diajukan kepada pengadilan (Majelis Hakim), maka sebagai seorang hakim harus mempertimbangkan segala hal, baik hal yang terkecil sampai hal pokoknya dan mempertimbangkan baik dari hukum acara sampai hukum materil agar tercapainya putusan yang didalamnya terkandung asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan permasalahan yang telah

diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kompilasi Hukum Islam memberi gambaran jelas mengenai harta bersama dalam Bab XIII, Pasal 85 sampai dengan 97 Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para ulama di Indonesia dan berdasarkan kitab fiqh yang berasal dari ulama-ulama besar Islam, dijelaskan bahwa penyelesaian perselisihan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian menjadi wewenang Pengadilan Agama, yang merupakan salah satu dari empat peradilan di Indonesia. Hal ini termuat di dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam. Apabila ada perselisihan mengenai harta bersama akibat perceraian yang terjadi terhadap orang-orang yang beragama Islam, maka hal tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
2. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor : 062/PDT.G/2009/PA.RGT tidak memenuhi asas kepastian hukum, karena dalam perkara ini Majelis Hakim menerima kesaksian kakak kandung Penggugat. Dalam bukti saksi apabila saksi diajukan untuk memberikan keterangan pengetahuannya terhadap suatu harta, maka saksi tidak boleh yang mempunyai hubungan darah dengan salah satu pihak yang berperkara, yaitu hubungan keluarga sedarah, ataupun keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus sesuai dengan Pasal 145 Ayat 1e (satu) HIR dan Pasal 172 Ayat 1 Rbg.

B. SARAN

Adapun saran dari pembahasan permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Diharapkan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dapat menjadi pilihan hukum yang akan digunakan bagi pihak yang bersengketa,

dan diharapkan pembagian harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan rasa adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan terzalimi.

2. Hakim dalam putusan tentang pembagian Harta Bersama hendaknya dapat lebih mempertimbangkan putusannya baik dari segala sisi maupun segi manfaatnya, ataupun akibat yang ditimbulkan dari putusan yang dibuatnya kepada kedua belah pihak yang berperkara, dan juga terhadap anak-anak pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arto, H.A Mukti, 2007 , *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fakultas, Tim Hukum UR, 2012, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Riau*, Unri Press, Pekanbaru
- Fuady, Munir, 2003, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kusuma, Hilma Hadi, 1999, *Hukum Perkawinan Adat*, Aditya Bakti, Bandung
- Lemek, Jeremies, 2007, *Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakkan Hukum di Indonesia*, Galang Press, Yogyakarta.
- Makarso, Taufik , 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Manan, Abdul, 2000, *Penerapan Hukum acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2005 , *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta.
- MK, M. Anshary, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, 2006, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Kencana Prenada Media Droup, Jakarta
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta
- Rofiq, Ahmad, 1998 , *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Satrio, J, 1991, *Hukum Harta Perkawinan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Siregar, Bismar, 1995, *Hukum Hakim dan Keadilan Tuhan*, Gema Insani Press, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 1982, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, CV Rajawali, Jakarta

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta

Syarifuddin, Amir, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Thalib, Abd, 2008, *Hukum Keluarga dan Perikatan*, UIR Press, Pekanbaru

Kamus

Ali, M. T. Deli, 2000, *Kamus Standar Bahasa Indonesia*, Penabur Ilmu, Bandung

Peraturan Perundang-Undangan

2006, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Sinar grafika, Jakarta

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Website

artikel “Menegakkan Keadilan Jangan Sekedar Menegakkan Hukum” dalam situs <http://erabaru.net/opini/65-opini/10099-menegakkan-keadilan-jangan-sekedar-menegakkan-hukum>, diakses tanggal 14 juni 2014, 19.00 WIB.

<http://kamarmakalah.blogspot.com/2011/12/makalah-ilmu-hukum.html>, 05 Mei 2014, 19.00 WIB

<http://www.inhukab.go.id/node/50>, 10 Mei 2014, 19.00 WIB

Wikipedia, *Kecamatan rengat* http://id.wikipedia.org/wiki/Rengat_IndragiriHulu, 10 Mei 2014, 19.00 WIB